

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

Haifa Zahratul Jannah <sup>1</sup>, Kusdarini <sup>2</sup>, Nila Wahyuni <sup>3</sup>

<sup>123</sup>Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

haifazahratuljannah01@gmail.com

### ABSTRACT

*The research aims to analyze and describe the Implementation of Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in Padang City. The research is based on the increasing amount of waste in Padang city from year to year, which results in a higher volume of waste being sent to the final disposal site (TPA). This has made Padang the largest producer of waste among all the districts/cities in West Sumatera. The method in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. Selection of research informants using purposive sampling technique, with source triangulation. The analysis of the research findings was carried out using the theory of policy implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn, which has six variables. The results of this research indicate that the implementation of the Household and Household- like Waste Management Policy in Padang has not been fully optimized, as the objectives of the policy have not yet been fully achieved. In the policy goals and objectives variable, the goals have not been fully achieved because the equity indicator has not yet been met. The human resources variable still faces deficiencies in both quality and quantity, as well as in terms of non-human resources. The social environment in the implementation of this policy, as seen from the public's response, shows that some people participate, while others do not. In terms of the economic indicator, support is still not maximized. Regarding the political environment, support from political elites has not been fully realized.*

**Keywords:** *Implementation; Waste Management; Household waste and household like waste*

### Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang paling banyak dijumpai pada saat ini dan paling penting untuk segera diselesaikan adalah permasalahan sampah. Permasalahan ini hampir ada di setiap daerah, volume sampah semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat aktivitas di masyarakat yang meningkat. Aktivitas manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah, setiap kegiatan yang dilakukan pasti menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk menyebabkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan.

Permasalahan sampah di perkotaan merupakan permasalahan umum yang banyak di jumpai di Indonesia. Penyebabnya adalah karena pertumbuhan populasi, urbanisasi yang begitu cepat, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan volume sampah rumah tangga semakin bertambah, hal ini merupakan salah satu faktor permasalahan sampah di perkotaan yang menyebabkan sistem pengelolaan sampah perkotaan tidak terkendali dan tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan sampah sampai saat ini belum tertangani dengan baik hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah yang dihasilkan di Sumatera Barat serta pengurangan sampah yang dilakukan belum maksimal, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Timbulan dan Pengurangan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jml Timbulan Sampah (Ton/Th)	Jml Pengurangan Sampah (Ton/Th)
1	Kab. Pesisir Selatan	56.558,72	10.746,16
2	Kab. Solok	58.083,03	7.690,19
3	Kab. Sijunjung	36.471,20	6.535,64
4	Kab. Tanah Datar	47.382,56	9.031,12
5	Kab. Agam	80.163,78	11.904,32
6	Kab. Lima Puluh Kota	56.964,67	13.483,54
7	Kab. Pasaman	44.884,05	11.458,90
8	Kab. Dharmasraya	38.458,75	6.338,00
9	Kab. Solok Selatan	27.542,75	3.371,23
10	Kab. Pasaman Barat	63.876,75	3.621,81
11	Kab. Padang Pariaman	79.593,54	4.497,04
12	Kab. Kep. Mentawai	13.902,75	97,32
13	Kota Padang	236.296,62	51.465,40
14	Kota Solok	20.199,06	3.882,26
15	Kota Sawah Lunto	6.925,99	1.714,18
16	Kota Padang Panjang	17.986,62	3.280,76
17	Kota Bukittinggi	46.607,36	5.331,88
18	Kota Payakumbuh	34.041,59	6.505,35

19	Kota Pariaman	14.408,74	955,30
<b>Total</b>		<b>980.348,53</b>	<b>161.910,40</b>

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Sumatera Barat adalah 980.348,53 ton/tahun. Sementara jumlah pengurangan sampah hanya sebesar 161.910,40 ton/tahun. Pengurangan ini tentu tidak setara dengan jumlah sampah yang sudah dihasilkan

karena jumlahnya masih jauh dari jumlah timbulan sampah. Berdasarkan data timbulan sampah diatas dapat dilihat bahwa Kota Padang sebagai penghasil sampah terbanyak dari semua kabupaten/kota yang ada. Kota Padang menghasilkan sampah sebanyak 236.296,62 ton/tahun atau setara dengan 647.39 ton/hari. Sementara jumlah pengurangan sampah Kota Padang sebesar 51.465,40 ton/tahun. Pengurangan sampah yang terlaksana ini juga tidak setara dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Karena jumlah pengurangan sampah masih jauh dari jumlah sampah yang dihasilkan.

Banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan Kota Padang salah satunya adalah dampak dari banyaknya jumlah penduduk Kota Padang. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab banyaknya timbulan sampah yang ada. Karena setiap kegiatan yang dilakukan manusia menghasilkan sampah, dengan banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak juga timbulan sampah yang dihasilkan. Berikut data jumlah penduduk Kota Padang seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut ini

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Padang**

Tahun	Jumlah
2020	909.040
2021	918.860
2022	942.938
2023	954.177

Sumber : Disdukcapil Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan tingkat konsumsi yang meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada jumlah sampah. Serta diikuti dengan banyaknya aktivitas yang terjadi di Kota Padang baik sebagai pusat pemerintah ibukota provinsi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat perindustrian dan daerah tujuan wisata menyebabkan timbulan sampah yang dihasilkan tidak dapat

dihindari. Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan tingkat konsumsi yang tinggi menyebabkan bertambahnya volume sampah di Kota Padang terutama pada sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Padang terdiri dari beberapa jenis sampah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Komposisi Sampah Kota Padang Berdasarkan Sumber Sampah

No	Jenis Sampah	Jumlah (ton)
1	Rumah Tangga	462.00
2	Perkantoran	20.00
3	Pasar	90.00
4	Perniagaan	20.00
5	Fasilitas Publik	40.38
6	Kawasan	7.00
7	Lainnya	8.00

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas sampah yang dihasilkan oleh Kota Padang paling banyak berasal dari sampah rumah tangga yaitu sebanyak 71,36% pada tahun 2023. Kemudian diikuti oleh pasar dengan angka 13,9% dan fasilitas publik dengan angka 6,24%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sampah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari adalah sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah di Kota Padang. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Padang tidak semuanya terkelola dengan baik.

Banyaknya volume sampah yang dihasilkan Kota Padang tanpa diiringi dengan pengelolaan sampah secara maksimal menyebabkan masalah karena sampah hanya dikumpul, diangkut dan dibuang ke TPA. Kondisi ini menyebabkan lahan TPA menjadi cepat penuh karena banyaknya sampah yang dibawa setiap harinya. TPA Air Dingin dengan luas 18 ha mulai beroperasi sejak tahun 1997. TPA Kota Padang diduga akan mencapai kapasitas pada tahun 2026 karena tingginya produksi sampah harian dan banyaknya sampah yang dibawa ke TPA per harinya. Dari 647 ton sampah yang dihasilkan Kota Padang per harinya, sampah yang dibawa ke TPA hanya 500 ton, sementara sisanya tidak diangkut ke TPA. Sekitar 40 ton sampah per hari tidak terkelola, sampah tersebut hanya dibiarkan sehingga menimbulkan bau

tidak sedap. Sampah yang tidak diangkut kemungkinan dipungut pemulung untuk disalurkan ke pusat daur ulang dan sisanya tidak terkelola.

Permasalahan selanjutnya yang ada pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang adalah pada proses pemilahan sampah. Pemilahan sampah di Kota Padang pada saat ini belum berjalan sesuai dengan yang semestinya, hal ini dapat dilihat pada tempat-tempat pembuangan sampah yang berada di kecamatan, kelurahan, dan lokasi publik lainnya belum semuanya mempunyai wadah pemilahan sampah. Tempat pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah tersebut hanya berada di beberapa tempat, dapat dilihat wadah tersebut hanya berada di beberapa lokasi. Bahkan pada lokasi yang memiliki wadah pemilahan sampah masih banyak dilihat sampah dimasukkan ke asal wadah, sehingga menyebabkan sampah tersebut dibuang tidak sesuai dengan jenisnya dan berujung tercampur.

Pada proses pemilahan sampah partisipasi masyarakat juga memiliki peran yang penting. Pada kenyataannya partisipasi dari masyarakat sebagai sumber daya manusia yang berperan penting dalam pemilahan sampah ini masih kurang. Rata-rata dari masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah secara mandiri karena menganggap memilah sampah adalah hal yang ribet dan berujung membuang sampah ke satu wadah dan membiarkannya tercampur. Serta masih ada juga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak peduli dengan sampah maupun lingkungan. Masyarakat juga kurang pengetahuan dalam pengelolaan sampah dan tidak mau tau apa itu pengelolaan sampah dan pentingnya pengelolaan sampah dari rumah sendiri. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini menyebabkan sampah yang dibawa ke TPA tidak berkurang karena tidak dilakukannya pemilahan dari sumber sampah.

Selain kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor utama juga masih kurang. Hal ini dilihat dari masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Tidak meratanya sosialisasi ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan sampah. Kurangnya sosialisasi ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk mengadakan sosialisasi. Selain kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi kendala lain yang ada dalam pengelolaan sampah ini adalah dalam segi anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tentunya dengan melibatkan masyarakat

sebagai penghasil sampah. Karena banyaknya timbulan sampah di TPA yang tidak terkelola yang membuat lahan TPA menjadi penuh sehingga TPA tidak bisa menampung sampah yang semakin banyak dan pengelolaan sampah di TPA juga tidak berjalan dengan maksimal dan belum berjalannya proses pengelolaan sampah sebagaimana mestinya. Serta proses pengelolaan sampah dari masyarakat sebagai penghasil sampah juga belum berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar pengelolaan sampah dapat berjalan baik dan timbulan sampah dapat berkurang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan suatu situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Pada penelitian ini observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, UPT TPA Air Dingin, Bank Sampah, LPS, Nasabah Bank Sampah, Petugas Kebersihan, dan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki informasi mengenai hal yang diteliti.

### **Hasil dan Diskusi**

Kebijakan publik merupakan produk yang dihasilkan pemerintah untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah publik dan produk tersebut menghasilkan sebuah hasil demi kepentingan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perumus kebijakan.

Pengelolaan sampah di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Selain itu dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasinya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) baik di TPS maupun di TPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan model pendekatan dari Donal Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model pendekatan ini terdapat enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

#### *Ukuran dan Tujuan Kebijakan*

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Suatu kebijakan harus memiliki kejelasan dalam ukuran dan tujuan kebijakan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk melihat bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua indikator yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu dengan menggunakan indikator jelas dan terukur.

Tujuan dari pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini sudah dituliskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 2 yaitu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara preventif dan represif.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang tujuannya sudah tertulis jelas dalam peraturan walikota yang berlaku. Tujuan dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini dituliskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Implementor dalam kebijakan ini memiliki pemahaman yang sama terkait sasaran dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang. Hal ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi, memfasilitasi, mengkoordinasi serta memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Akan tetapi tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih belum tercapai karena pada proses pemilahan belum semua masyarakat yang melakukan pemilahan. Pemilahan seharusnya dilakukan dengan cara memisahkan sampah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya. Dan sampah tersebut dibuang ke wadah pemilahan yang sudah disediakan. Pada kenyataannya pemilahan ini belum berjalan maksimal karena wadah pemilahan sampah belum ada di semua lokasi di Kota Padang dan di TPS juga tidak disediakan wadah pemilahan sampah. Sehingga untuk pengumpulan sampah sampah tersebut hanya dikumpulkan menjadi satu tanpa dipisah berdasarkan jenisnya. Ditambah lagi pemilahan sampah dari rumah oleh masyarakat juga belum terlaksana dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan masih banyaknya timbulan sampah Kota Padang.

Selanjutnya pada indikator keadilan dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai implementor utama sudah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat Kota Padang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sosialisasi yang diadakan belum merata ke semua kelurahan yang ada di Kota Padang. Hal ini terjadi karena adanya kendala dari segi sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki. Dengan demikian sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Padang.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi pada pelaksanaannya, belum semua masyarakat Kota Padang mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

dikarenakan terdapat kendala dari segi sumber daya manusia dan finansialnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementor belum bersikap adil kepada semua kelompok sasaran.

### *Sumber Daya*

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, Kebijakan publik harus memiliki sumber daya yang memadai dari segi kualitas atau kuantitas. Ketersediaan sumber daya manusia sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sumber daya manusia yang ada masih kurang. Sehingga hal ini dapat menghambat jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang khususnya Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan pada dasarnya sudah mencukupi. Tetapi sumber daya manusia yang bertugas khusus penyuluhan atau sosialisasi masih kurang. Sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini kurang. Sumber daya manusia yang ada untuk melakukan sosialisasi saat ini hanya ada 4 orang sehingga hal ini akan mempengaruhi jalannya sosialisasi. Dan sumber daya manusia di lapangan yaitu petugas kebersihan juga dikatakan kurang. Sehingga untuk pelaksanaannya pada saat ini hanya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Sumber daya manusia masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini juga masih kurang. Karena tidak semua masyarakat melakukan pemilahan sampah dirumah. Rata-rata masyarakat langsung membuang sampah ke tps tanpa dipilah. Masyarakat yang melakukan pemilahan rata-rata merupakan nasabah dari bank sampah. Sementara masyarakat lain yang tidak menjadi nasabah bank sampah tidak melakukan pemilahan sampah di sumber sampah. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah dari sumber dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Sehingga sumber daya manusia dari masyarakat sebagai masyarakat sendiri masih kurang.

Sumber daya non manusia juga berperan penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Sumber daya non manusia meliputi sumber daya finansial atau serta sarana dan prasarana. Dengan adanya dukungan sumber daya finansial suatu kebijakan dapat terealisasi

dengan baik karena didukung dengan anggaran yang ada. Apabila sumber daya manusia tidak didukung dengan sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang memadai hal ini akan berdampak terhadap kinerja kebijakan. Sumber daya anggaran dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Padang yang juga berpengaruh terhadap tersedianya sarana dan prasarana dalam program ini.

Dalam hal ini sumber daya non manusia dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu dari segi anggaran dan sarana prasarana juga masih kurang. Kekurangan anggaran dalam kegiatan ini akan berdampak pada sosialisasi dan proses pengelolaan sampah seperti penambahan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan. Selanjutnya kekurangan sarana prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan dalam proses pengangkutan sampah sehingga akan menghambat proses pengelolaan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn maka indikator sumber daya non manusia dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum maksimal sehingga menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang.

#### *Karakteristik Agen Pelaksana*

Karakteristik agen pelaksana merupakan sifat, ciri atau bentuk yang ada di dalam sebuah organisasi yang melaksanakan kebijakan. Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana karakteristik agen pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat Kota Padang. Struktur birokrasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selaku implementor dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Bidang yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang adalah bidang program pengembangan komunikasi dan kemitraan lingkungan dan bidang pengelolaan sampah dan kebersihan. Menurut analisis peneliti dengan adanya bidang khusus ini mempermudah pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak luar dinas itu sendiri. Pelaksanaan itu berupa koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan bank sampah dalam melaksanakan

proses pengelolaan sampah ini. Selain itu, dengan adanya struktur birokrasi yang sederhana ini dapat memudahkan implementor dalam komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dinas. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn struktur birokrasi dari pelaksanaan kebijakan akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini cukup sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya kebijakan ini.

Pada indikator norma-norma dapat dilihat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak memiliki aturan khusus yang mengatur pegawai dalam menjalankannya. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berpedoman kepada aturan pegawai negeri sipil dan juga etika pegawai. Dengan adanya aturan pegawai negeri sipil dan etika pegawai ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, selain itu aturan yang berlaku ini juga tidak menghambat jalannya kebijakan tersebut.

Sedangkan pola hubungan antar para pelaksana dalam kebijakan ini sudah berjalan dengan baik. Sebab pola komunikasi dan informasi di internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ini berjalan baik begitu juga dengan eksternal dinas. Sehingga hubungan antar agen pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak menjadi hambatan yang berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah.

#### *Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana*

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu koordinasi dari implementasi kebijakan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik maka hal ini akan menghambat proses implementasi kebijakan, terlebih lagi jika sumber- sumber informasi memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap tujuan dan ukuran kebijakan. Sehingga hal ini akan menyulitkan agen pelaksana untuk memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dari internal maupun eksternal organisasi, baik secara horizontal maupun vertikal agar pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini terjadi antara internal dinas, bank sampah dan lembaga pengelola sampah.

Komunikasi antar internal dinas sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari rapat yang diadakan setiap minggu sebagai ajang evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Sedangkan komunikasi antar eksternal dinas juga berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bank sampah dan juga LPS yang ada di Kota Padang. Dalam komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh dinas dengan bank sampah dan Lps sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi dinas dengan bank sampah terkait sosialisasi pengelolaan sampah yang akan di lakukan. Sementara untuk Lps komunikasi yang dilakukan adalah pelaporan terkait sampah yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kota Padang. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara internal dan eksternal dinas berjalan dengan baik. Dengan adanya komunikasi ini dapat mempermudah implementor dalam mencapai maksud dan tujuan kebijakan. Karena implementor memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang jika dilihat dari variabel komunikasi antar aktivitas pelaksana dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar sesama implementor sudah terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan dengan lancar.

#### *Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana*

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga peneliti akan mengukur sikap dan kecenderungan agen pelaksana dengan melihat bagaimana respon agen pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melihat pemahaman agen pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan pandangan pribadi atau preferensi nilai agen pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Respon implementor dalam kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang akan sejalan dengan implementasinya.

Implementor yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang cenderung setuju serta mendukung adanya kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini, meskipun pengelolaan sampah ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Menurut analisis peneliti persetujuan dari implementor terjadi karena dalam aturan ini jelas mengatakan tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah mengendalikan timbulan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, sikap dari para pelaksana yang cenderung mendukung dapat meningkatkan presentase keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang.

Kognisi atau pemahaman dari implementor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan publik. Pemahaman implementor merupakan hal yang sangat penting dikarenakan implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran dari implementor terhadap kebijakan secara menyeluruh. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai implementor utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini memahami tujuan dan aturan dari kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, hal ini tidak menjadi penghambat dari implementasi kebijakan karena menurut Van Meter dan Van Horn pemahaman dari implementor terhadap ukuran dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Intensitas disposisi implementor merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Hal ini mengacu pada kecenderungan dari implementor terhadap suatu nilai untuk menentukan pilihan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Pada intensitas disposisi implementor terdapat persamaan dalam penerimaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini. Informan yang peneliti wawancarai telah mendukung jalannya kebijakan tersebut. Namun sebagai implementor mereka masih memiliki persepsi lain untuk memperbaiki kekurangan kebijakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara merata serta kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dengan adanya aturan tambahan ini diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

#### *Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik*

Kondisi lingkungan eksternal juga ikut mempengaruhi kinerja dari kebijakan publik. Lingkungan eksternal disini adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap dukungan dan penolakan dari kelompok sasaran kebijakan.

Kondisi sosial termasuk salah satu indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi sosial pada suatu wilayah berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Kondisi sosial biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

Masyarakat Kota Padang sebagian sudah mengetahui kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini sehingga sudah melakukan pengolahan sampah dari sumber sampah yaitu dengan memilah sampah yang dihasilkan. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Masih banyak dari masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah dari sumber sampah sehingga menyebabkan masih banyaknya timbulan sampah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang terdapat kondisi yang menghambat keberhasilan kebijakan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi akan menjadi penentu apakah kelompok sasaran akan bersemangat berpartisipasi dalam implementasi kebijakan atau sebaliknya. Kondisi ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn adalah tersedianya sumber daya ekonomi pada lingkungan eksternal kebijakan atau program.

Pada kondisi ekonomi dapat dilihat masyarakat Kota Padang yang menengah ke atas tidak mempermasalahkan tarif pembayaran retribusi sampah tetapi mereka kebanyakan tidak

melakukan pemilahan. Sementara masyarakat menengah kebawah rata-rata melakukan pemilahan karena sampah yang dipilah dapat disetor ke bank sampah, dan setelah itu mereka akan mendapatkan intensif berupa uang. Berdasarkan pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap jalannya kebijakan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tidak melakukan pemilahan dari sumber sampah sehingga masih banyaknya sampah yang dibuang ke TPS dan dibawa ke TPA. Yang mana kondisi ini menyebabkan masih banyaknya timbulan sampah dan sampah yang di bawa ke TPA tidak berkurang. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kota Padang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Selain dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi ekonomi, faktor lain yang juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik adalah kondisi politik. Pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan dukungan dari elit politik agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik.

Dukungan dari pemerintah berupa anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Walaupun sudah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah akan tetapi anggaran yang ada belum cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, dapat dilihat pada sosialisasi terkait pengelolaan sampah belum dilakukan merata ke seluruh wilayah Kota Padang. Dan juga visi dan misi walikota Padang belum mendukung pengelolaan sampah. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, kondisi politik pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang belum mendukung secara maksimal terlaksananya kebijakan tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan variabel teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut masih belum dapat dipenuhi secara utuh. Pada variable ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan dari kebijakan belum tercapai sepenuhnya sehingga indikator kebijakan masih belum terpenuhi. Pada variable sumber daya masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas begitu juga

dengan sumber daya non manusia. Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan ini sangat baik. Demikian juga dengan disposisi para pelaksana yang mendukung dan memahami kebijakan ini serta pola hubungan birokrasi di internal dan eksternal pelaksana kebijakan juga sudah berjalan dengan baik. Lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan ini cenderung memiliki respon yang berbeda. Pada indikator ekonomi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan pada indikator politik dukungan dari elit politik belum maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, Awan dan Dudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Juriko. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Volume 9, No 4.
- Adetio, Purtama. 23 April 2024. Kota Padang Masih Kekurangan TPS, <https://padek.jawapos.com/padang/2364566342/kota-padang-masih-kekurangan-tps>. Diakses pada 15 Mei 2024
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Akbar, Muhammad Ali. 2023. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. (Skripsi IPDN)
- Azizah, Nora. 14 Juli 2022. Sampah Kota Padang Capai 640 Per Hari. <https://www.republika.co.id/berita/rf09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari>. Diakses pada 15 Januari 2024
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses 25 Januari 2024
- Cahyadi, A., Siati, dan Fatih, A. Al. 2018. Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. Demograpfy Journal of Sriwijaya. Volume 2(2); 25–35.
- Chotimah, C. 2020. Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tulungagung: Akademia Pustaka.

- Davella, Dimas Vaty. 2023. Implementasi Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember)
- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Buku Pedoman 3R Berbasis Masyarakat Di Kawasan Permukiman. Jakarta
- Fauzi, Ahmad. 2022. Metodologi Penelitian. Banyumas: CV Pena Persada
- Fiantika, Feny Rita, dkk. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasan Muhammad dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Tahta Media Grup.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Revormasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Komarudin, Arif. 2023. Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal Of Education And Humanity. Volume 3 No 4
- Nafurbenan, Octavianus. 2022. Penanganan dan Pengelolaan Sampah. Makassar: Chasti Pustaka Indonesia
- Padang.go.id. 14 September 2023. Kurangi Sampah ke TPA, Pembentukan Bank Sampah Jadi Prioritas. <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas>. Diakses pada 15 Januari 2024
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 15 Januari 2024
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan, dan Studi Kasus Edisi dan Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service)

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan, dan Studi Kasus Edisi dan Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service)

Yusuf, Muri. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.